



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Telepon (021) 8584816 (*hunting*), Faksimile (021) 85903713

Nomor : OT.04/LAP- 09 /D1/05/2023 6 April 2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Deputi Bidang PIP Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
Triwulan I Tahun 2023

Yth. Sekretaris Utama BPKP
di Jakarta

Kami sampaikan Laporan Kinerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Triwulan I Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian *Outcome* Triwulan I Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman s.d. Triwulan I Tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian *Outcome* Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis (Sastra)/IKU	Satuan	Target		Realisasi Tw-I	Capaian (%)	
			2023	Tw-I		2023	Tw-I
I	<i>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah</i>						
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi	Rp (Juta)	210.000	-	150.977	71,89	-
1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara	Rp (Juta)	885.000	-	2.761.500	312,03	-
1.3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Juta)	136	-	3,36	2,47	-
II	<i>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional</i>						
2.1	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	PP	12	-	-	-	-
2.2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	KP	48	-	-	-	-
2.3	Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target	PPS	27	-	-	-	-
2.4	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	9	-	-	-	-
V	<i>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L</i>						

No	Sasaran Strategis (Sastra)/IKU	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2023	Tw-I	Tw-I	2023	Tw-I
5.1	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L	23	-	-	-	-
5.2	Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L	24	-	-	-	-
5.3	Persentase K/L/P dengan MRI \geq Level 3	K/L	20	-	-	-	-

*sesuai Perkin D1

Kinerja Deputy Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi
2. Nilai Pengeluaran Negara yang Efisien
3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Dari hasil pengukuran kinerja Sastra 1, berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I Tahun 2023, secara keseluruhan Deputy Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal sebesar Rp2.912.481.100.594,09 yang berasal dari Optimalisasi Penerimaan Negara Rp150.997.777.671,09; Efisiensi Pengeluaran Negara Rp2.761.499.959.442,00 dan Penyelamatan Keuangan Negara Rp3.363.481,00.

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja sastra 1 adalah sebagai berikut:

1.1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi

Nilai Potensi Penerimaan Negara yang Terealisasi adalah nilai optimalisasi penerimaan Negara yang dapat direalisasikan berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Penerimaan Negara sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Negara adalah pajak, bea cukai, dan PNBPN, serta sumber penerimaan lainnya. Penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan

lain-lain PAD yang sah. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan penerimaan Negara secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi diukur dari Nilai koreksi Pajak, Bea, Cukai, PNBP, dan/atau penerimaan negara lainnya yang kurang bayar dan/atau pengurangan lebih bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan periode tahun berjalan.

Pada Triwulan I Tahun 2023, Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi berdasarkan hasil pengawasan BPKP berjumlah Rp150.997.777.671,09 atau mencapai 71,89% dari target Tahun 2023 sebesar

Tabel 2. Ringkasan Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)	Penjelasan
1.	Pajak dan Bea Cukai	7.867.057.973,00	1 LHP pemeriksaan pajak
2.	PNBP	143.110.719.698,09	9 LHP pemeriksaan Migas dan 8 LHP pemeriksaan pertambangan
Jumlah		150.997.777.671,09	

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi pada Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp150.997.777.671,09 berasal dari hasil pengawasan dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Bea Cukai sebesar Rp7.867.057.973,00 berasal dari hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan (D101) berupa pemeriksaan pajak.
2. Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp143.110.719.698,09 berasal dari hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan (D101) sebesar Rp77.781.420.661,33 dan hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Bidang PPESDA (D102) sebesar Rp56.920.416.928,76 serta Rp8.408.882.108,00 yang merupakan kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yang diakui rendal D102.

1.2. Nilai Pengeluaran Negara yang Efisien

Nilai pengeluaran negara yang efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Yang dimaksud

dengan perencanaan tidak tepat antara lain tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.

Nilai pengeluaran negara yang efisien diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/ kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan/atau efisien yang direkomendasikan untuk:
 - a) dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih efektif atau lebih hemat;
 - b) rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih efektif atau lebih hemat; atau
 - c) ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- 2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, verifikasi tunggakan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dsb
- 3) Nilai koreksi rencana investasi/rencana biaya operasional pada konsesi, KPBU, pemanfaatan BMN, dsb. berdasarkan laporan hasil pengawasan.

Pada Triwulan I Tahun 2023, nilai pengeluaran negara yang efisien berdasarkan hasil pengawasan BPKP yaitu sebesar Rp2.761.499.959.442,00 mencapai 312% dari target tahun 2023 sebesar Rp885.000.000.000,00.

Ringkasan nilai pengeluaran negara yang efisien disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Nilai Pengeluaran Negara yang Efisien per Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)	Penjelasan
Direktorat Pengawasan Bidang ITRP (D103)			
1	Efisiensi Pengeluaran Lainnya	375.103.136.646,00	Koreksi negatif atas nilai investasi sesuai penelitian dan evaluasi Kementerian Perhubungan terhadap kajian kelayakan konsesi PT Pelabuhan Talenta Bumi
2	Efisiensi Pengeluaran Lainnya	2.386.396.822.796,00	Koreksi negatif atas biaya pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun 2022 oleh PT KAI (Persero)
Jumlah		2.761.499.959.442,00	

Nilai efisiensi pengeluaran negara sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.761.499.959.442,00. Efisiensi ini diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan (D103), yaitu:

1. Reviu atas Perhitungan Jangka Waktu Konsesi Penyediaan dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Melalui Mekanisme Penugasan/Penunjukan Kepada PT Pelabuhan Talenta Bumi dari nilai sebelum reviu sebesar Rp879.305.935.000,00 dan nilai setelah reviu sebesar Rp504.202.798.354,00.
2. Reviu atas Biaya Pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara tahun 2022 oleh PT KAI (Persero) sebesar Rp2.386.396.822.796,00 yang tidak dialokasikan dalam APBN TA.2022 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012.

1.3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Nilai penyelamatan keuangan negara adalah Nilai rekomendasi pengembalian ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan/atau nilai aset yang dipulihkan berdasarkan hasil pengawasan. Nilai penyelamatan keuangan negara diukur dengan menjumlahkan Nilai rekomendasi pengembalian ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dan/atau nilai aset yang dipulihkan.

Per Triwulan I tahun 2023, nilai penyelamatan keuangan negara berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP yang berada di bawah rendal D105.

Tabel 4. Ringkasan Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2023

No	Jenis Pengawasan	Nilai (Rp)	Penjelasan
Perwakilan BPKP :			
1.	Perwakilan Kepri	1.063.381,00	Audit DOISP
2.	Perwakilan Gorontalo	2.300.100,00	Audit KOTAKU
	Total Perwakilan	3.363.481,00	

Nilai penyelamatan keuangan negara sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh kontribusi Perwakilan Kepulauan Riau dan Perwakilan Gorontalo sebesar Rp3.363.481,00.

2

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
2. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
3. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target
4. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

Capaian Indikator kinerja tersebut kami uraikan seperti berikut:

2.1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target Jumlah program prioritas (PP) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah PP yang tercapai target terhadap total jumlah PP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan.

Target kinerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman untuk kinerja pada tahun 2023 sebanyak 12 program prioritas.

Per Triwulan I tahun 2023, belum ada program prioritas yang dievaluasi pada karena pengawasannya akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

Program Prioritas yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada Tahun 2023 sesuai jadwal per triwulan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Evaluasi Program Prioritas Tahun 2023

No.	Program Prioritas	Rencana Pelaksanaan
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Triwulan IV
2	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Triwulan IV
3	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Triwulan IV
4	Energi dan Ketenagalistrikan	Triwulan IV
5	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Triwulan IV
6	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Triwulan IV
7	Infrastruktur Ekonomi	Triwulan IV
8	Infrastruktur Perkotaan	Triwulan IV
9	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	Triwulan IV

10.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Triwulan IV
11.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Triwulan IV
12.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Triwulan IV

2.2. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah kegiatan prioritas (KP) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah KP yang tercapai target terhadap total jumlah KP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan.

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Deputi, target Kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak 48 kegiatan prioritas. Per Triwulan I tahun 2023, belum ada kegiatan prioritas yang dievaluasi sehingga belum bisa menyimpulkan ada tidaknya KP yang tercapai sesuai target. Direktorat-direktorat mengawasi sebanyak 52 KP (lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Perkin) yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perkin, 48 Kegiatan Prioritas yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada tahun 2023 sesuai jadwal per triwulan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Evaluasi Program Prioritas Tahun 2023 per Triwulan (sesuai target dalam Perkin)

Direktorat	Kegiatan Prioritas (KP)	Rencana Pelaksanaan
D101	Melaksanakan sebanyak 5 KP	Triwulan IV
D102	Melaksanakan sebanyak 13 KP	Triwulan IV
D103	Melaksanakan sebanyak 12 KP	Triwulan IV
D104	Melaksanakan sebanyak 15 KP	Triwulan IV
D105	Melaksanakan sebanyak 3 KP	Triwulan IV

2.3. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah proyek prioritas strategis yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara Jumlah PPS yang tercapai target atas total jumlah PPS yang dilakukan pengawasan.

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak 27 proyek prioritas strategis. Per Triwulan I tahun 2023, belum ada proyek prioritas strategis yang dievaluasi sehingga belum bisa menyimpulkan ada tidaknya PPS yang tercapai sesuai target. Direktorat-direktorat mengawasi sebanyak 32 PPS (lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Perkin) yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perkin, target 27 Proyek Prioritas Strategis yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada tahun 2023 sesuai jadwal per triwulan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Proyek Prioritas Strategis Tahun 2023 per Triwulan (sesuai target dalam Perkin)

Direktorat	Proyek Prioritas Strategis (PPS)	Rencana Pelaksanaan
D102	Melaksanakan 8 PPS	Triwulan IV
D103	Melaksanakan 17 PPS	Triwulan IV
D104	Melaksanakan 2 PPS	Triwulan IV

**2.4. Jumlah
Proyek
Strategis
Nasional
yang Tercapai
Sesuai Target**

Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara Jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan.

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak 9 proyek strategis nasional.

Per Triwulan I tahun 2023, ada 3 proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target. PSN yang tercapai sesuai target antara lain:

- 1) Program Satu Juta Rumah (Rumah Susun)
- 2) Program Satu Juta Rumah (Rumah Swadaya)
- 3) Pelabuhan Patimban.

Pengawasan Proyek Strategis Nasional akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Target 9 PSN yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada tahun 2023 sesuai jadwal per triwulan adalah sebagai berikut:

Tabel 8. PSN Tahun 2023 per Triwulan

Direktorat	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Rencana Pelaksanaan
D102	Melaksanakan pengawasan 3 PSN	Triwulan IV
D103	Melaksanakan pengawasan 3 PSN	Triwulan IV
D104	Melaksanakan pengawasan 3 PSN	Triwulan IV

5

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
3. Persentase K/L/P dengan MRI \geq Level 3

Capaian Indikator kinerja tersebut kami uraikan sebagai berikut:

5.1. Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dari jumlah APIP K/L dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3 dibandingkan dengan jumlah total APIP K/L.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 23 K/L dari 25 K/L Mitra. Per Triwulan I tahun 2023, K/L dengan kapabilitas \geq 3 sebanyak 52% (13 APIP K/L dari 25 APIP K/L Mitra), atau mencapai 56,52% dari target tahun 2023. APIP K/L Mitra dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 9. APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

No.	Ditwas	Nama K/L
1	D101	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	D101	Kementerian Keuangan
3	D101	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4	D101	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
5	D101	Badan Pusat Statistik
6	D102	Kementerian Pertanian
7	D102	Kementerian Kelautan dan Perikanan
8	D102	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9	D102	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	D102	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
11	D103	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12	D103	Kementerian Perhubungan
13	D103	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Masih rendahnya capaian kinerja ini disebabkan penilaian kapabilitas APIP K/L Triwulan III dan IV Tahun 2023 belum dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023. Saat ini masih menunggu hasil penilaian mandiri (PM) dari K/L mitra untuk

selanjutnya dievaluasi. Evaluasi atas hasil PM K/L rencananya akan dilaksanakan pada TW III dan IV.

Rincian Level Kapabilitas APIP K/L Mitra disajikan pada Lampiran 3.

5.2. Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 penuh diukur dari jumlah K/L dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3; dibandingkan dengan jumlah K/L.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 24 K/L dari 25 K/L Mitra. Per Triwulan I tahun 2023, K/L dengan maturitas SPIP \geq 3 sebanyak 60% (15 K/L dari 25 K/L Mitra), atau mencapai 62,5% dari target tahun 2023.

Tabel 10. APIP K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

No.	Ditwas	Nama K/L
1	D101	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2	D101	Badan Pusat Statistik
3	D101	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4	D101	Badan Koordinasi Penanaman Modal
5	D101	Kementerian Keuangan
6	D101	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7	D101	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
8	D102	Kementerian Pertanian
9	D102	Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	D102	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11	D102	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	D102	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
13	D103	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14	D103	Kementerian Perhubungan
15	D103	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Masih rendahnya capaian disebabkan sebagian besar K/L Mitra masih dalam proses penilaian mandiri (PM) atau penjaminan kualitas (PK) SPIP Terintegrasi sehingga belum dapat dievaluasi oleh BPKP. Evaluasi atas hasil penilaian mandiri K/L tersebut direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III atau IV.

Rincian Level Maturitas SPIP K/L Mitra disajikan Pada Lampiran 3.

5.3. Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3 Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3 diukur dari jumlah K/L yang melaksanakan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3 dibandingkan dengan total K/L.

Target kinerja pada tahun 2023 sebanyak 20 K/L dari 25 K/L Mitra. Belum terdapat realisasi atas indikator kinerja ini. Indeks Manajemen Risiko K/L

merupakan salah satu keluaran dari evaluasi atas hasil penilaian mandiri SPIP terintegrasi yang sampai dengan Triwulan I belum dapat dilaksanakan.

Rincian Indeks Manajemen Risiko K/L Mitra, berdasarkan hasil penilaian *baseline* pada tahun 2022, disajikan pada Lampiran 3. Nilai MRI tersebut merupakan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang terdapat dalam penilaian maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2022 dan akan dilakukan evaluasi pada Triwulan IV oleh BPKP.

B. Kinerja Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2023

1. Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan (D101):

Dalam Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan telah melaksanakan penugasan Agenda Prioritas Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 11. APP pada Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

No.	APP
1	Pengawasan atas Tata Kelola Investasi Sektor Energi
2	Pengawasan atas Tata Kelola Pendanaan pada Sektor Ketahanan Energi
3	Pengawasan atas Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)
4	Pengawasan atas Pusat Data Nasional
5	Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L
6	Pengawasan atas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM
7	Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM
8	Pengawasan atas Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata
9	Pengawasan atas Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah
10	Pengawasan atas Pembangunan dan Tata Kelola IKN
11	Pengawasan atas P3DN
12	Pengawasan atas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat
13	Pengawasan atas Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
14	Pengawasan atas Insentif Pajak UMKM

2. Direktorat Pengawasan Bidang PPESDA (D102):

Dalam Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Bidang PPESDA telah melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 12. APP pada Direktorat Pengawasan Bidang PPESDA

No.	APP
1	Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional
2	Pembangunan dan Tata Kelola IKN
3	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L
4	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat

No.	APP
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM

3. Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan (D103)

Dalam Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan telah melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 13. APP pada Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan

No.	APP
1	Pembangunan dan Tata Kelola IKN
2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L
3	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat
4	P3DN
5	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata
6	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)
7	Dukungan Pengembangan Pariwisata
8	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional
9	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan
10	Reforma Agraria

4. Direktorat Pengawasan Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan (D104)

Dalam Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Bidang EKPK telah melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 14. APP pada Direktorat Pengawasan Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan

No.	APP
1	Pariwisata
2	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata
3	Pengembangan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)
4	Dukungan Pengembangan Pariwisata
5	Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM

5. Direktorat Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan (D105)

Dalam Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Bidang KIPP telah melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 15. APP pada Direktorat Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan

No.	APP
1	Program P3DN (BPKPBPB Sabang)
2	Program P3DN (BP Batam)
3	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023
4	Percepatan Penurunan Stunting
5	Pembangunan dan Tata Kelola IKN (kelembagaan)
6	Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional

C. Capaian Output Pengawasan Triwulan I Tahun 2023

Realisasi *output* Pengawasan Deputi 1 BPKP sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebanyak 58 Laporan mencapai 29,15% dari target tahun 2023 sebesar 199 Laporan, dengan ringkasan sebagaimana pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 16. Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan BPKP Triwulan I Tahun 2023 pada Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023*	Realisasi Tw. I 2023	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara, Daerah dan Desa	16	11	68,75
2	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	48	14	29,17
3	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	10	1	10,00
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	62	12	19,35
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	7	2	28,57
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	13	6	46,15
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	20	12	60,00
8	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	21	0	0,00
9	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	0	0,00
	Total	199	58	29,15

*sesuai target pada RKA

Sumber: SIMA dan e-Sakip

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. IKK dengan capaian paling tinggi diperoleh dari IKK "Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa" (68,75%) yang berasal dari realisasi kegiatan pengawasan APP.

2. Capaian kinerja yang masih sangat rendah ditunjukkan oleh IKK "Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan" dan "Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut" yang direncanakan dilaksanakan Triwulan II dan IV.

Rincian output pengawasan dapat dilihat pada Lampiran II.

D. Kendala Pencapaian Target

Pada Triwulan I tahun 2023, tidak ada kendala signifikan yang memengaruhi pencapaian target namun pada beberapa Ditwas (D101 dan D102) masih terdapat penugasan pengawasan yang bergantung dari permintaan kementerian/lembaga (K/L) mitra Ditwas.

E. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar Rp4.161.603.327,00 atau 25,07% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp16.596.886.000,00 dengan ringkasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2023 Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Program	Anggaran	Realisasi	(%)
	(Rp)	Tw. I 2023 (Rp)	
Program Dukungan Manajemen (WA)	1.879.882.000	354.658.349	18,87
Program Pengawasan Pembangunan (CH)	14.717.004.000	3.806.944.978	25,87
Jumlah	16.596.886.000	4.161.603.327	25,07

Sumber data: Aplikasi SPAN

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


Deputi Kepala BPKP
Salamat Simanullang

CAPAIAN OUTCOME TRIWULAN I TAHUN 2012
PADA DEPUTI PEREKONOMIAN DAN KEMERITIMAN

NO	INDIKATOR INDIKATOR	D1.1		D1.2		D1.3		D1.4		Df.1
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kesehatan Organisasi									
2	Indeks Reformasi Birokrasi									
3	Open BKR									
4	Nilai BAKIP									
5	Indeks Resiliensi									
6	Indeks SPPI									
7	Indeks MR									
8	WCI BKR									
9	Indeks Kualitas Layanan Masyarakat									
10	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Divestasi BUMN WISDM	150.000	85.648	60.000	65.329	660.000	2.781.500	10.000	-	36
11	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang terrealisasi (dalam rupiah)			215.000	100					
12	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara (dalam rupiah)									
13	Nilai Pertumbuhan Kredit (dalam rupiah)									
14	Nilai Distribusi dan Pemerataan Daerah yang Terrealisasi									
15	Persentase Pembiayaan Daerah yang Dipertanggungjawabkan									
16	Jumlah Badan Usaha dengan Tingkat Divergen Fisikal terhadap Keuangan Negara dan Daerah Kabupaten			4	4	4	4	4	BT	-
17	Persentase efisiensi biaya pada badan usaha									
18	Jumlah PP yang Terseleksi Sesuai Target			13	13	12	12	16	BT	3
19	Jumlah KP yang Terseleksi Sesuai Target	5		8	8	17	17	2	BT	-
20	Jumlah PPS yang Terseleksi Sesuai Target							3	BT	-
21	Jumlah PSN yang Terseleksi Sesuai Target			3	3	3	3	3	BT	-
22	Jumlah PP yang Mengikuti Danansi Abadi/abadi									
23	Jumlah Badan Usaha dengan Tingkat Dukungan terhadap Pembangunan Nasional Kabupaten									
24	Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang Diatasi/akui									
25	Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas operasional Bank									
26	Persentase BUMN dengan Total Kelala Kompartasi Bank									
27	Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat									
28	Persentase BU dengan Kapabilitas SP1 s.d Level 3									
29	Persentase BU dengan MRL s.d Level 3									
30	Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat									
31	Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat									
32	Persentase Hasil Pengawasan Reguler yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti									
33	Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Fisikal yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti									
34	Jumlah KI dengan Efektivitas Pengendalian Kinerja Bank									
35	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Kinerja Bank									
36	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Kinerja Bank									
37	Persentase APB MD Pemda dengan Kapabilitas APSP s.d Level 3	7		6	6	6	6	6	-	1
38	Persentase KUP Pemda dengan Maturitas SPPI s.d Level 3	7		6	6	6	6	6	-	1
39	Persentase KI dengan MRL s.d Level 3	7		6	6	6	6	6	-	1
40	Persentase Pemda Provinsi dengan MRL s.d Level 3	7		6	6	6	6	6	-	1
41	Persentase Pemda Kabupaten dengan MRL s.d Level 3	7		6	6	6	6	6	-	1

Keterangan:

BT = Belum terpenuhi

BU = Belum dapat

BTD = Belum tersedia data

RINCIAN KINERJA OUTPUT PENGAWASAN S.D. 31 MARET 2023

Kode Unit Kerja	Unit Kerja	Nama Output	Target	Realisasi	Capaian Output
D1.1	Direktoral Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang diluncurkan	48	14	29,17%
		Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	2	0	0,00%
		Sub Jumlah	56	14	30,36%
D1.2	Direktoral Pengawasan Bidang Pangan, Perikanan, dan Sumber Daya Alam	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	23	2	8,70%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan dan Konktivitas	4	1	25,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kelahanan Ekonomi	10	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pangan	2	0	0,00%
		Kualitas Pengendalian Intern K/L	45	7	15,56%
		Sub Jumlah	9	7	88,89%
D1.3	Direktoral Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Pembangunan	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	3	7	233,33%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	3	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konktivitas	7	4	57,14%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	3	1	33,33%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kelahanan Ekonomi	4	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pangan	2	1	50,00%
		Kualitas Pengendalian Intern K/L	31	21	67,74%
		Sub Jumlah	31	21	67,74%
D1.4	Direktoral Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	2	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konktivitas	1	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	8	8	88,89%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kelahanan Ekonomi	7	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pangan	2	0	0,00%
		Kualitas Pengendalian Intern K/L	36	8	22,22%
		Sub Jumlah	36	8	22,22%
D1.5	Direktoral Pengawasan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembangunan	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Keuangan Negara, Daerah, dan Desa	2	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	1	100,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konktivitas	4	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	4	2	50,00%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pangan	2	0	0,00%
		Kualitas Pengendalian Intern K/L	16	2	12,50%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	2	0	0,00%
		Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	0	0,00%

RINCIAN KINERJA OUTPUT PENGAWASAN S.D. 31 MARET 2023

Kode Unit Kerja	Unit Kerja	Nama Output	Target	Realisasi	Capaian Output
		Sub Jumlah	31	5	16,13%
TOTAL			198	58	0,29

RINCIAN LEVEL KAPABILITAS APIP, LEVEL MATURITAS SPIP, INDEKS MANAJEMEN RISIKO K/L MITRA

No.	Ditwas	Nama K/L	SPIP			APIP			MR*	
			Skor	Level	Predikat	Level	Predikat	Skor	Predikat	
1	D1.1	Kemendagri	3.478	3	Terdefinisi	2	Structured	3.02		
2	D1.1	BKPM	3.436	3	Terdefinisi	2	Structured	3.21		
3	D1.1	LKPP	3.594	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.072		
4	D1.1	BPS	3.596	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.569		
5	D1.1	Kemendagri	4.07	4	Terkelola dan terukur	4	Institutionalized	4.49		
6	D1.1	Kementerian PPN/Bappenas	3.00	3	Terdefinisi	3	Delivered	3		
7	D1.1	PPATK	3.752	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.6		
8	D1.2	Kementerian Pertanian	3.470	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.46		
9	D1.2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.500	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.51		
10	D1.2	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3.279	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.07		
11	D1.2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3.679	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.68		
12	D1.2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.500	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.36		
13	D1.3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.743	3	Terdefinisi	3.27	Delivered	3.96		
14	D1.3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	2.681	2	Berkembang	2.42	Structured	2.44		
15	D1.3	Kementerian Perhubungan	3.474	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.00		
16	D1.3	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3.227	3	Terdefinisi	3.355	Delivered	2.60		
17	D1.4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.61	3	Terdefinisi	3	Delivered	3.7		
18	D1.4	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan	3.464	2	Berkembang	3	Delivered	2.82		
19	D1.4	Kementerian Perindustrian	3.036	3	Terdefinisi	3	Delivered	2.82		
20	D1.4	Kementerian Perdagangan	3.3	3	Terdefinisi	3.105	Delivered	3.34		
21	D1.4	Kementerian Ketenagakerjaan	3.07	3	Terdefinisi	2.72	Structured	3.4		
22	D1.4	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	3.32	3	Terdefinisi	3.2	Delivered	3.26		
23	D1.4	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2.907	2	Berkembang	2.8	Structured	2.45		
24	D1.5	Badan Pengusahaan Batam	2.675	2	Berkembang	2	Structured	1		
25	D1.5	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang	2.354	2	Berkembang	1	Initial	2		

*Berdasarkan hasil penilaian baseline

Rencana pencapaian target RP tahun 2023 yang didasarkan pengelompokan

No	PN	PP	Indikator Sasial RKP Tahun 2023	Target RPD (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinasi	
4		05.03 PP: Infrastruktur Perikanan	<p>01 - Jumlah ikan yang dibesarkan/peliharaan tidak aktif/tingkat kesakitan/terpapar penyakit (jumlah) tidak</p> <p>02 - Jumlah sistem angkutan umum ikan/di perikanan (jenis) yang dikawatirkan/kumulatif/darat</p> <p>03 - Jumlah kawanan di perikanan/kumulatif perikanan yang ditangkap melalui anjungan ikan</p>	<p>0 (berlayar) lokal</p> <p>0 (perangkap) wala</p> <p>8 kawanan</p>	-	-	-	-	
0104	Menyediakan Kebutuhan Ekspor Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<p>01.05 PP: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi</p> <p>01.06 PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor PIA, dan Industri Kecil</p>	<p>01 - Rasio modal UMKM terhadap total kredit perbankan</p> <p>02 - Pertumbuhan MFR (tda)</p> <p>03 - Rasio kredit PIS industri/golongan menengah</p> <p>04 - Rasio kredit PIS industri/pengalaman menengah</p> <p>05 - Nilai tambah ekonomi lokal</p> <p>06 - Jumlah usaha baru/induksi/pelaku terapan/kelompok usaha baru/pelembah</p> <p>07 - Jumlah usaha kerja ekonomi umum</p> <p>08 - Nilai realisasi PMA dan PMAK</p> <p>09 - Nilai realisasi PMA dan PMAK industri/pengalaman</p> <p>10 - Jumlah lapangan kerja baru</p> <p>11 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>12 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>13 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>14 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>15 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>16 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>17 - Jumlah lapangan kerja ekonomi umum</p> <p>18 - Nilai realisasi PMA dan PMAK</p> <p>19 - Nilai realisasi PMA dan PMAK industri/pengalaman</p> <p>20 - Jumlah lapangan kerja baru</p> <p>21 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>22 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>23 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>24 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>25 - Jumlah lapangan kerja ekonomi menengah</p> <p>26 - Nilai ekspor hasil perikanan</p> <p>27 - Jumlah ekspor komoditas perikanan</p> <p>28 - Rasio Logistik Perikanan Indonesia</p> <p>29 - Rasio M21/05</p> <p>30 - Peningkat tingkat and laju pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan ekonomi)</p> <p>31 - Jumlah hasil (JGD) luar negeri/pengalaman (pertumbuhan ekonomi)</p> <p>32 - Rasio M20 yang berbasis tenaga terampil/TKSD</p>	<p>31,66%</p> <p>2,74%</p> <p>3,40%</p> <p>5,90-6,08%</p> <p>18,85%</p> <p>1.279,0 (Jumlah lapangan kerja)</p> <p>2.1.20 (Jumlah usaha baru)</p> <p>14,56%</p> <p>14,05 (Jumlah usaha baru)</p> <p>20,66 (Jumlah usaha baru)</p> <p>1.316-1.400 (Jumlah lapangan kerja)</p> <p>483 (Jumlah lapangan kerja)</p> <p>30,3 (Jumlah lapangan kerja)</p> <p>3,4 (Jumlah lapangan kerja)</p> <p>3,3-7,4 (Jumlah lapangan kerja)</p> <p>0,031 (Jumlah lapangan kerja)</p> <p>0,5-10,7 %</p> <p>7,86 miliar USD</p> <p>4,05-4,57 %</p> <p>3,4 skor</p> <p>40-49,4 %</p> <p>31-32 (pertumbuhan ekonomi)</p> <p>66%</p> <p>memenuhi R</p> <p>1,14 %</p>	-	-	-	-	
2									
3		01.07 PP: Penguatan Dapur Bersama, Peningkatan Kualitas Pengolahan, Logistik, dan Pengangkutan Dalam Negeri (TKDN)							
4		01.08 PP: Penguatan Nilai Pertumbuhan dan Daya Saing Industri							

Kincir pencapaian target KP tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2023	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Keordinator
D101 1	01.06 PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor RIL, dan Industrialisasi	01.06.05 KP: Perubahan Iklan Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketersajaeraan	01 - Kontribusi PMCN terhadap total realisasi PMA dan PMCN	44.80%	0	0	D101
			02 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	48.50%	0	0	
			01 - Produk terasertifikasi TKDN > 25 % yang masih berlaku	7.640 produk (kumulatif)	0	0	
			01 - Persentase realisasi pendanaan negara	100%	0	0	
2	01.07 PP: Peningkatan Ekspor Bermilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Keadungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.04 KP: Peningkatan Komungan dan Penguatan Produk Dalam negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	4 database	0	0	
			02 - Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce	1 database	0	0	
			03 - Pelaksanaan semua pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	3 database	0	0	
			04 - Ketersediaan data statistik disegregasi PMTB	1 database	0	0	
3	01.08 PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01.08.05 KP: Reformasi Fiskal	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI DPP/ KP/PP) terhadap wilayah	>1	0	0	
			02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	17 kawasan	0	0	
			03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	2 jumlah destinasi	0	0	
			04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	2 jumlah destinasi	0	0	
4	01.08.06 KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi	Peningkatan Ekonomi, Terutama Pangan, Kesehatan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	6 kawasan	0	0	
			06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5 jumlah KI	0	0	
			07 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KP/PPB)	2 jumlah kawasan	0	0	
			01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI DPP/ KP/PP) terhadap wilayah	>1	0	0	
5	02.01 PP: Pembangunan Wilayah Sumatera	02.01.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Kapasitas Terpasang Tambahan Pembangkit EBT	2.000 Mega Watt	0	0	
			01 - Jumlah pemanfaatan biofuel untuk Domestik	14,60 Juta Kilo Liter	0	0	
			01 - Intensitas energi primer	35,2 SBMiliar rupiah	0	0	
			02 - Penurunan intensitas energi final	0,8 SBMiliar rupiah	0	0	
D102 1	01.01 PP: Pemanuhan Kebutuhan Energi Dengan Memanfaatkan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01.01.01 KP: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - TRCN sektor pembangkit EBT	45%	0	0	
			01 - Konsumsi daging	14,4 kg/kapitahun	0	0	
			02 - Konsumsi protein asal lemak	12,7 gram/kapitahun	0	0	
			03 - Konsumsi sayur dan buah	30 1,3 gram/kapitahun	0	0	
2	01.01.02 KP: Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	04 - Konsumsi ikan	61,02 kg/kapitahun	0	0	
			05 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	90-95 %	0	0	
			06 Luas lahan produksi beras biofortifikasi	150.000 ha	0	0	
			07 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	80 % pemerintah BPNT	0	0	
3	01.01.03 KP: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	01.01.03 KP: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	08 - Persentase pangsa pangan organik	15%	0	0	

Rincian pencapaian target KP tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2023	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Koordinator
6		01.03.03 KP: Peningkatan ketertarikan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Peningkatan lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75%	0	0	
7		01.03.03 KP: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Peternakan dan Kapasitas Pasar	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	45,4 juta ton	0	0	
8		01.03.04 KP: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, Hasil Digitalisasi Pertanian	02 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang diunggulkan	2,78 juta ton	0	0	
9	01.04 PP Peningkatan Pengelolaan Kemitertanian, Peternakan dan Kelautan	01.04.01 KP: Peningkatan Penghasilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penilaian Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	03 - Sumber data pemelaksanaan tanaman dan hewan sumber pangan yang terdatalogi tersedia	34,12 juta ton	0	0	
10		01.04.02 KP: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01 - Peningkatan WPP	5,9 juta ton	0	0	
11		01.04.03 KP: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	02 - Akurasi pendataan stok dan pemantauan WPP	80-90 %	0	0	
12		01.04.04 KP: Peningkatan Fasilitas Usaha, Penyiangan, dan Akses Peningkatan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil	03 - Penyediaan petanian ruang laut dan zona pesisir	30 dan 8 varietas unggul baru dan gelur 4.250 aksesi	0	0	
13		01.04.05 KP: Peningkatan SDM dan Riset Kemitertanian dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	01 - Peningkatan WPP	11 unit	0	0	
14	05.04 PP Energi dan Kelengkapan	05.04.01 KP: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Kelengkapan	02 - Akurasi pendataan stok dan pemantauan WPP	11 MWP	0	0	
15		05.04.03 KP: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	03 - Peningkatan petanian ruang laut dan zona pesisir	30 RZ	0	0	
D103			01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	15.000.000 ha	0	0	
1	01.02 PP: Peningkatan Kuantitas/Kesehatan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01.02.01 KP: Peningkatan Akses Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	01 - Produk ikan	18,48 juta ton	0	0	
2	05.01 PP: Infrastruktur Polyanan Dasar	05.01.01 KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	02 - Produk sumpul laut	12,10 juta ton	0	0	
			03 - Produk garam	2,00 juta ton	0	0	
			01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	9,91 triliun rupiah	0	0	
			02 Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	104 indeks	0	0	
			01 - Jumlah mediateknologi kelautan dan perikanan yang layak adopsi	3 produk	0	0	
			01 - Susut panen	9%	0	0	
			02 - Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit	17%	0	0	
			01 - Jumlah cadangan operasional 2.23 hari (88M)	23 hari	0	0	
			02 - System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	3 jampelangpantahun	0	0	
			01 - Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi (turnover)	19.600 km	0	0	
			01 - Jumlah volume lapangan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif)	15,9 miliar m	0	0	D103
			01 - Jumlah hutan baru layak hun yang terbangun melalui peran pemerintah	4.988 unit	0	0	
			02 - Jumlah Rumah Tenaga yang Menemai Fasilitas Pembiayaan Perumahan termasuk SMF dan TAPEIRA	20.600 rumah tangga	0	0	

Rincian pencapaian target KP tahun 2023 yang dilakukan pengawasannya

No	pp	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2023	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Koordinator
3			03 - Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Menikmati Bantuan Subsidi Pembiayaan Pemukiman berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pemukiman (BUPP)	220.000 rumah tangga	0	0	
			04 - Jumlah Peningkatan Kualitas Hunian melalui Puraan Pemasalahan	124.750 unit	0	0	
			05 - Jumlah luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	275 ha	0	0	
			06 - Jumlah kabupaten/kota yang mengadopsi model konduktif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	48 kabupaten	0	0	
			07 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar kondisi lingkungan	48 kabupaten	0	0	
4		05.01.04 KP: Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran	0,97	0	0	
			02 - Rasio kejadian kecelakaan perorangan per juta penerbangan	2,15	0	0	
			03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	0,23	0	0	
			04 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran darat per 10.000 pelayaran	84	0	0	
		05.01.05 KP: Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	15,9 miliar m	0	0	
			02 - Jumlah benrungan yang ditingkatkan tujuannya	22 unit	0	0	
			03 - Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan risiko risiko	10 unit	0	0	
			04 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	9 daerah irigasi	0	0	
			05 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	5.500 ha	0	0	
5	05.02 PP: Infrastruktur Ekonomi	05.02.01 KP: Konktivitas Jalan	01 - Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan atau siapakan	8 lokasi	0	0	
			02 - Panjang Jalan Prioritas Nasional yang dibangun	379,8 km	0	0	
			03 - Panjang Jembatan Prioritas Nasional yang dibangun	10.337,8 m	0	0	
6		05.02.02 KP: Konktivitas Kereta Api	01 - Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	74 (berlanjut) km	0	0	
			02 - Panjang jalur Kereta Api yang ditugaskan	329 (berlanjut) km	0	0	
7		05.02.03 KP: Konktivitas Laut	01 - Jumlah lokasi awal pengembangan/pembangunan pelabuhan penunjang konektivitas laut	27 lokasi	0	0	
			02 - Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan kemak yang tetap dan teratur	158 rute	0	0	
8		05.02.04 KP: Konktivitas Udara	01 - Jumlah layanan udara dan Angkutan Kargo Perintis angkutan BEM untuk	43 rute	0	0	
			02 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan	45 lokasi	0	0	
			03 - Jumlah layanan angkutan udara perintis	228 layanan	0	0	

Rincian pencapaian target KP tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2023	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Koordinator
9		05.02.05 KP: Konektivitas Darat	01 - Jumlah kebutuhan penyeberangan, darau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan 02 - Jumlah terminal penumpang dan barang artemagata serta terminal tipe A yang dibangun 03 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan 04 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	24 lokasi 13 lokasi 336 layanan 325 layanan	0 0 0 0	0 0 0 0	
10	05.03.01 PP: Infrastruktur Perkotaan	05.03.01 KP: Transportasi Perkotaan	01 - Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun/dikembangkan (kota) 02 - Jumlah angkutan umum perkotasan berbasis jalan yang dibangun/dikembangkan (kota)	4 Kota 11 Kota	0 0	0 0	
11		05.03.03 KP: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	01 - Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyiangan akses air minum dan air limbah yang aman dan and	7 kabupaten	0	0	
12		05.03.04 KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui penertajahan	1 kawasan	0	0	
D104							D104
1	01.05.01 PP: Penguatan Kinerja Usaha Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01.05.01 KP: Peningkatan Kinerja Usaha Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Proposal UMK (Inklusif Mikro Kecil) yang berjalan 02 - KM yang melakukan kerjasama dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	10,00% 160 RKM (kumulatif)	0 0	0 0	
2		01.05.02 KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	01 - Proposal UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 02 - Proposal KM dengan pinjaman/kredit 03 - Proposal penyuluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	29,27% 4,10% 75,00%	0 0 0	0 0 0	
3		01.05.03 KP: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	340 unit (kumulatif)	0	0	
4		01.05.04 KP: Peningkatan Pencapaian Start-Up dan Peluang Usaha	01 - Proposal nilai tambah RUM terhadap nilai nilai tambah industri 02 - Penumbuhan start-up	19,60% 2.800 start-up (kumulatif)	0 0	0 0	
5	01.06.01 PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor RI, dan Industrialisasi	01.06.01 KP: Peningkatan Industri Start-Up dan Digital	03 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi	12.000 WUB 16 KI KEK Industri	0 0	0 0	
6		01.06.02 KP: Peningkatan Industri Kecil dan Daya Saing Produk dan Usaha Kecil dan Digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif 02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	5,4-5,9 % 7%	0 0	0 0	
7		01.06.05 PP: Peningkatan Industri Healt	Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	3 sektor industri	0	0	
8	01.07.01 PP: Peningkatan Ekspor Bermilai Tambah, dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.01 KP: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	01 - Nilai ekspor industri pengolahan 02 - Kontribusi ekspor industri pengolahan (komputer, instrumen amah, mesin listrik, dispartare) 03 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen amah, mesin listrik, dispartare) 04 - Ekspor hasil pertanian (jaja) 05 - Pertumbuhan ekspor pertanian 06 - Nilai ekspor produk industri kehutanan	170,9 miliar USD 0,75 0,125 4,7 miliar USD 9,0-10,0 % 10 miliar USD	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	

Rincian pencapaian target KP tahun 2021 yang dilakukan pengesahan

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2023	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Koordinator
9		01.07.02 KP: Peningkatan Akses dan Pendaftaran Pasar Ekspor	07. Rasio ekspor jasa terhadap PDB 08. Nilai ekspor produk rempah 01- Jumlah negara tujuan ekspor 02- Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	1,7-1,8 % 1.785,84 juta USD 222 negara 2,30%	0 0 0 0	0 0 0 0	
10		01.07.03 KP: Pengolahan Impor	Jumlah kesempatan industri dalam jaringan produksi global	3,90%	0	0	
11		01.07.05 KP: Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Roratz Terimbang)	52,00%	0	0	
12		01.07.06 KP: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	01- Jumlah branding Wonderful Indonesia 02- Nilai ekspor ekonomi kreatif 03- Jumlah warisan budaya yang divergenasi (cultural heritage regeneration) 01- Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	10 akreditasi branding 25,45 miliar USD 2 lokasi 96 negara	0 0 0 0	0 0 0 0	
13		01.07.07 KP: Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	02- Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 03- Jumlah nilai ekspor perijinan kerja sama ekonomi internasional 04- Jumlah promosi Tourism, Trade, and Investment (TTI) terintegrasi 05- PIA/TA/CEPA yang disepakati	75 negara 4 realisasi 9 promosi terintegrasi 36 (kumulatif) kesepakatan	0 0 0 0	0 0 0 0	
14	01.08 PP: Penguatan Pilar Perubahan dan Daya Saing Ekonomi	01.08.02 KP: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	1. Kontribusi ekonomi digital 2. Nilai transaksi e-commerce 3. Skor Logistic Performance Index 4. Tingkat inflasi 01 - Skor logistik performance index 02 - Tingkat inflasi	0,05 843,4 triliun rupiah 3,4 2,0-4,0% 3,4 2,0-4,0%	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
15		01.08.03 KP: Peningkatan Sistem Logistik dan Skalabilitas Harga	01 - Efisiensi pemabuhan industri yang menerapkan prinsip industri hijau 02 - Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	0,06	0	0	
16		01.08.04 KP: Peningkatan Pencapaian Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	01 - Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	11 lokasi	0	0	
D105			Peningkatan lutsapan hutan	450.000 ha	0	0	0105
1	01.02 PP: Peningkatan kuantitas/kuualitas air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01.02.06 KP: Pemertanahan, pemulhan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Luas distribusi akses keada dan memliati kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat (ha) 01- Pertumbuhan PDB perkebunan	1.750.000 ha 8%	0	0	
2	03.05 PP: Penguatan Kemiskinan	03.05.04 KP: Penguatan Sosial	01-06.01 KP: Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	5,90%	0	0	
3	01.05 PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor RI dan Industrialisasi		02- Pertumbuhan PDB hortikultura	5,90%	0	0	

Rincian pencapaian target KP tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	PP	KP	Indikator Sesuai MKP Tahun 2023	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Koordinator
			03-Perumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman 01-Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK KI / DPP) KIR(PB) terhadap wilayah	6,30%-6,85%	0	0	
4	02.02 PP: Peningkatan Wilayah Jawa Barat	02.02.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	02-Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan 03-Desinasi Pariwisata Prioritas (DPP) 04-Destikasi Pariwisata pengembangan dan revitalisasi 05-KEK berbasis pariwisata dan industri 06-KI prioritas dan KI pengembangan	>1 nilai 12 kawasan 2 jumlah destinasi 3 jumlah destinasi 3 kawasan 2 jumlah KI	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	

Rincian pencapaian target PPS tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJMN/RKP Tahun 2023	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
D102			NTP105-107	0	0	-	D102
1	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani Dan Nelayan	Peningkatan nilai tukar petani (NTP 105-107); Meningkatkan nilai tambah per tenaga kerja pertanian: Rp57,00 juta/tenaga kerja/tahun; Peningkatan Nilai Tukar Nelayan 107-108; Terbentuk 150 klaster korporasi petani. Peningkatan produksi ikan budi daya 9,48 juta ton pada 2023 dan 10,32 pada 2024; Peningkatan kesejahteraan pembudi daya. ikan (Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan 104 pada tahun 2023 dan 105 pada tahun 2024); Nilai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar US\$ pada tahun 2023 dan 8,0 miliar US\$ pada 2024 (udang menyumbang 35-40%); Jumlah kluster kawasan sentra produksi perikanan budi daya komoditas unggulan (termasuk kluster udang) sebanyak 50 kawasan di tahun 2024..	Rp57,00 juta/tenaga kerja/tahun 107-108 150 klaster 9,48 juta 104 7,66 miliar US\$ 50 kawasan	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	
2	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Produksi perikanan tangkap 9,00 juta ton pada tahun 2023 dan 10,10 juta ton pada 2024; Nilai Tukar Nelayan 107-108 pada tahun 2023 dan 107 pada tahun 2024; Nilai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar US\$ pada tahun 2023 dan 8,0 miliar US\$ pada tahun 2024; Terbangunnya 3 pelabuhan perikanan terintegrasi pada tahun 2024. Mengurangi biaya rumah tangga sampai dengan Rp. 90.000-100.000/bulan per keluarga Meningkatnya Kapasitas Pengolahan limbah	9,00 ton 107-108 Nilai Tukar 7,66 miliar US\$ 3 Pelabuhan Rp. 90.000-100.000/bulan per keluarga kurang lebih 254.500 ton	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	
3	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional						
4	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah						

Rincian pencapaian target PPS tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJMN/RKP Tahun 2023	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
5	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Mendukung pencapaian target indeks Kualitas Lingkungan Hidup menuju 69,48 (2023) dan 69,74 (2024) Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 10 unit pada tahun 2023 dan 11 unit pada tahun 2024 Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 1 unit (2023) dan 2 unit (2024)	69,48 10 unit 1 unit	0 0 0	0 0 0	- - -	
6	Food Estate (kawasan sentra produksi pangan)	Meningkatkan ketersediaan beras (45,4 juta ton, nasional); Produksi jagung (34,12 juta ton, nasional); Peningkatan Nilai Tukar Petani (baseline 2020= 101,65; 2023=105-107); Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023= Rp57 Juta/Orang/Tahun); Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah); Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah; Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah); Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha di Kalimantan Tengah. Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9 persen pada 2023 dan menuju 23 persen pada 2024.	45,4 juta ton 34,12 juta ton 105-107 Rp57 Juta 5,3% 356,9 ribu	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	

Rincian pencapaian target PPS tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJMN/RKP Tahun 2023	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
7	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	Tercapainya intensitas energi primer sebesar 135,2 SBMMiliar rupiah pada tahun 2023 dan 133,8 SBMMiliar rupiah pada tahun 2024. Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8 persen pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap baseline (BAU).	135,2 SBMMiliar 12,80%	0 0	0 0	- -	
8	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Menurunkan Potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim terhadap total PDB sebesar 1,10% (2023) Mendukung pencapaian target indeks Kualitas Lingkungan Hidup menuju 69,48 (2023) dan 69,74 (2024) Meningkatkan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini bencana tsunami kepada masyarakat menjadi di bawah 3,5 menit (2023) dan 3 menit (2024)	69,48 3,5 menit	0 0	0 0	- -	
9	Pipa gas bumi trans Kalimantan	Terlaksananya dukungan pembangunan pipa gas bumi dengan target panjang ruas pipa transmisi dan distribusi pada tahun 2023 (kumulatif tersebar) sepanjang 19.800 km (bila RIJTDGBN telah ditetapkan)	19.800 km (bila RIJTDGBN telah ditetapkan)	0	0	-	
D103							D103
1	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,1-5,6% di tahun 2023. Tercapainya rasio pertumbuhan investasi kawasan Batam-Bintan terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau > 1 di tahun 2023 dan 2024.	5,1-5,6% >1	0 0	0 0	- -	
2	Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Wilayah Metropolitan sebesar 2% menjadi 50,69 (Skenario Rendah) di tahun 2023 dan 4% menjadi 51,87 (Skenario Rendah) di tahun 2024.	50,69 skenario	0	0	-	

Rincian pencapaian target PPS tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJMN/RKP Tahun 2023	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
3	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,5-6,0% pada tahun 2023 (baseline 2019: 4,966)	5,5-6,0%	0	0	-	
4	Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Kota Baru sebesar 3% menjadi 37,98 (Skenario Rendah) di tahun 2023 dan 6% menjadi 39,14 (Skenario Rendah) di tahun 2024.	37,98	0	0	-	
5	Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	Memulihkan pelayanan publik yang terdampak akibat bencana sampai dengan 75% pada tahun 2023 dan 100% pada Tahun 2024 hingga berfungsi untuk melakukan pelayanan masyarakat.	75%	0	0	-	
6	PKSN Kawasan Perbatasan Negara	Meningkatnya rata-rata nilai indeks pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN menjadi 0,50 (2023)	0,5	0	0	-	
		Meningkatnya rata-rata nilai indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Anuk Menjadi 0,5 (2023) dan 0,52 (2024)	0,5	0	0	-	
		Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)PKSN Alambua menjadi 0,46 (2023) dan 0,48(2024)	0,46	0	0	-	
		Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura menjadi 0,43 di tahun 2023 dan 0,45 di tahun 2024	0,43	0	0	-	
7	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Menurunkan waktu tempuh pada jalur lintas utama pulau menjadi 2,08jam/100 km	2,08 jam/100 km	0	0	-	
		Menurunkan waktu tempuh Aceh-Lampung; dari 48 jam menjadi 37 jam (2023); dan 30 jam (2024)	37 jam	0	0	-	
8	Kereta Api Makassar-Pare Pare	Terbangunnya KA Makassar-Parepare	50%	0	0	-	
		progres 50% (2023) dan 70% (2024)					

Rincian pencapaian target PPS tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJMN/RKP Tahun 2023	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
9	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Meningkatnya persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) sebesar 25% (2021); 26% (2023); 27% (2024) dan total pelayaran nasional	26%	0	0	-	
		Terbangunnya Pelabuhan Patimban	1 Pelabuhan	0	0	-	
		Standarisasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar	2 Pelabuhan terstandarisasi	0	0	-	
		Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Akses Pel. Tj. Priok, dan jalan akses Pel. Kijing	3 jalan akses	0	0	-	
10	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Angkutan umum massal perkotaan yang dibangun un atau dikembangkan tahun 2023 hingga tahun 2024 sebanyak 6 metropolitan	3 metropolitan (2023) dan 3 metropolitan (2024)	0	0	-	
		Pembangunan Pengaman pantai	8,67 km	0	0	-	
		Pembangunan Pengendali Banjir	0,3 Km	0	0	-	
11	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Mengurangi Laju penurunan tanah dan dampaknya	Laju penurunan tanah 2022 - Laju penurunan tanah 2023 > 0	0	0	-	
		Terlaksananya Konstruksi bendungan di 4 lokasi	4 lokasi	0	0	-	
12	18 Waduk Mulliguna	Terlaksananya tahapan modernisasi irigasi di 8 Daerah Irigasi	8 Daerah Irigasi	0	0	-	
13	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua	8,1-9,3 persen	0	0	-	
		Menurunkan harga bahan pokok di Wilayah Papua	20-30%	0	0	-	
		Target jumlah rute jembatan udara di Wilayah Papua	35 rute	0	0	-	
		Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dibangun dan dikembangkan	8 lokasi	0	0	-	
14	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Presentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota	93/73/63 persen	0	0	-	
		Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,08 jam/100 Km	0	0	-	

Rincian pencapaian target PPS tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJMN/RKP Tahun 2023	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
15	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Meningkatkan konektivitas mulai terbangunnya jalan dan jembatan sebagai jalur lintas utama Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	Jalan sepanjang 47,9 Km dan jembatan sepanjang 1.388,8 m 93/73/63 persen 2,08 jam/100 Km 86,03%	0	0	-	
16	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 86,03% (2023) dan 90% (2024)	86,03%	0	0	-	
17	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan 19,06% (2021); 28,01%(2023), dan 30,45% (2024) Meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui akses air minum aman yang memenuhi standar kesehatan dengan target sebesar 14,22% (2023) dan 15% (2024)	28,01% 14,22%	0	0	-	
18	Rumah Susun Perkotaan (1 Jula)	Meningkatnya akses rumah tangga yang menempati hunian layak huni 67,88% (2023) dan 70% (2024) Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional	67,88%	0	0	-	
19	Pemulihan 4 DAS Kritis	Pembangunan bangunan pengendali banjir 4 unit	1 sistem perumahan publik yang profesional 4 unit	0	0	-	
20	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	Pembangunan pengendali banjir Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung 100% pada tahun 2023	0,9 Km 100%	0	0	-	
D104	Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB meningkatnya devisa sektor pariwisata meningkatnya jumlah wisatawan nusantara meningkatnya jumlah wisatawan nusantara	4,40% 1,76-6,08 miliar US\$ 600 juta perjalanan 3,5-7,4 juta kunjungan	0	0	-	D104

Rincian pencapaian target PPS tahun 2023 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJM/IRKP Tahun 2023	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
2	Pengelolaan Terpadu UMKM	<p>meningkatnya jumlah tenaga kerja parawisata</p> <p>Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas untuk 5 destinasi Parawisata Super Prioritas (DPSP)</p> <p>Peningkatan proposi Kunjungan wisatawan DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%</p> <p>Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;</p> <p>Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;</p> <p>Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;</p> <p>Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024;</p> <p>Terbangunnya 10 Rumah Produksi Bersama/Factory Sharing;</p> <p>Pengembangan jaringan usaha untuk 350 koperasi.</p>	14,85 juta orang	0	0	-	
			5 DPSP	0	0	-	
			32%	0	0	-	
			21,44%	0	0	-	
			2,74%	0	0	-	
			5,40%	0	0	-	
			16,40%	0	0	-	
			10 Rumah	0	0	-	
			350 Koperasi	0	0	-	
			43,00%	0	0	-	
3	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	<p>Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43% (2023) dan 43,10% (2024)</p> <p>Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 25,10% (2023) dan 26,08% (2024)</p>	25%	0	0	-	
				0	0	-	

Rincian pencapaian target PSN tahun 2023 yang dilakukan pengawas

No	Nama PSN	Indikator	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
D102							
1	Perhutanan Sosial	Luas areal perhutanan sosial	150.000 Ha	0	0		
2	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga	1 Fasilitas	0	0		
3	Peremajaan Kebun Rakyat	Peremajaan Perkebunan Rakyat Non Kelapa Sawit Peremajaan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit	13.350 Ha 180.000 Ha	0 7.351,95 Ha	0 4,08		
D103							
1	Program Satu Juta Rumah (Rumah Susun)	-	100,00	100,00	100,00%		
2	Program Satu Juta Rumah (Rumah Swadaya)	-	100,00	100,00	100,00%		
3	Bendungan Ciawi	-					
4	Bendungan Sukamahi	-					
5	Kampus Ulli	-					
6	Reforma Agraria	-					
7	Nasional Capital/ Integrated Coastal Development (NIC/ICD)	-					
8	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	-					
9	Jalan Tol Akses Exit Tol	-					
10	Proyek Jakarta Sewerage System (JSS)	-	78,19	75,41	96,44%		
11	Pengembangan Superhub	-					
12	Bandar Udara Kediri	-					
13	KA Jakarta - Surabaya	-					
14	KA Logistik di Kalimantan Timur	-	100,00	100,00	100,00%		
15	Pelabuhan Patimban	-					
D104							
1	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Program Strategis Nasional)	Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial,					
2	Program Pemerataan Ekonomi (Program Strategis Nasional)	17 Kawasan Industri					
3	Sektor Kawasan						